

AJUKAN GUGATAN PRAPERADILAN

# Panji Gumilang Minta Asetnya Dikembalikan

**JAKARTA (KR)** - Tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dalam petitumnya, Panji meminta majelis memutuskan agar semua aset yang dibekukan oleh Bareskrim Polri dikembalikan lagi.

"Memerintahkan kepada termohon (Bareskrim Polri) untuk mengembalikan seluruh aset-aset Pesantren Ma'had Al-Zaytun yang disita," kata Kuasa Hukum Panji Gumilang, Alvin Lim saat membacakan permohonan di PN Jaksel, Kamis (2/5).

Menurutnya, penetapan tersangka Panji Gumilang tidak berdasar, bahkan kejaksaan juga mengembalikan berkas perkara TPPU yang disangkakan kepada Panji

Gumilang dengan alasan berkas tidak lengkap. Selain itu, P-19 (berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan menunjukkan bahwa penyidik tidak memberikan dua alat bukti dalam penetapan tersangka TPPU kepada Panji Gumilang.

"Untuk itu, pada permohonan praperadilan yang diajukan di PN Jaksel, meminta penetapan tersangka kepada Panji Gumilang terkait kasus TPPU harus dibatalkan demi hukum dan semua aset yang dibekukan dan diblokir segera dikembalikan. Menyatakan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang, karena tidak sesuai dengan ke-

tentuan hukum dan dinyatakan batal demi hukum," kata Avin.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan merinci aset itu terdiri atas tanah, kendaraan dan uang tunai. Tanah terdiri lima bidang tanah di Kota Depok seluas 866 meter persegi dengan nilai Rp 6 miliar. Kemudian, terdapat 42 bidang tanah di Kabupaten Indramayu dengan luas total 29,6 hektare (sekitar 296 ribu meter persegi) senilai Rp 27,3 miliar. Untuk kendaraan, tiga unit mobil Isuzu Mux senilai Rp 1,1 miliar dan uang di 16 rekening Bank Mandiri senilai Rp 271 miliar dan satu rekening berisi uang dollar Amerika Serikat senilai 480.700 dolar AS.

(Ant/Has)-d



**KESADARAN MEMBUANG SAMPAH:** Warga naik sepeda melewati Jalan Sirkuit, Sidomoyo, Godean, Sleman, yang di tepinya berserakan bungkus beresisi sampah, Kamis (2/5/2024). Sebagian warga masyarakat kurang memiliki kesadaran dengan membuang sampah di sembarang tempat termasuk di jalan-jalan desa.

## MK

permohonan pemohon secara keseluruhan dengan menggandeng 8 kantor hukum untuk menjawab dan menghadirkan alat bukti dengan mengkonsolidasi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta KPU untuk menghadapi PPHU Pileg 2024 secara serius usai mendapati komisioner KPU RI selaku Temohon dalam Perkara Nomor 246-01-12-06/PHPU.DPR-PPRD-XXII/2024 tidak hadir dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

"Tolong disampaikan KPU harus serius. Jadi sejak (sengketa) pilpres KPU nggak serius menanggapi persoalan-persoalan ini. Itu harus disampaikan ke komisioner," kata Arief Hidayat, ketua sidang panel tiga

dalam persidangan di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, kemarin.

Mulanya, pemohon dalam perkara, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) mendalilkan, ada pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Lahat. Menurut kuasa hukum PAN, pembukaan kotak suara yang terjadi pada 27 April 2024 itu diperintahkan KPU RI.

PAN mempersoalkan pembukaan kotak suara itu awalnya ditujukan untuk pengambilan bukti berupa dokumen D.Hasil Kabupaten, D.Hasil Kecamatan, C.Hasil dan C.Hasil Salinan. Tetapi, bukti yang diambil justru tidak berkaitan.

"Semestinya yang menjadi pokok permasalahannya adalah C.hasil yang tidak konsisten dengan D.Hasil. Jadi, yang

harus dihadirkan mestinya C.Hasil, tapi di berita acara itu yang diambil KPU justru daftar hadir," kata pihak PAN.

Arief Hidayat kemudian mengonfirmasi kepada KPU selaku termohon. Namun, Komisioner KPU RI tidak ada di ruang sidang. "Saya minta konfirmasi dari termohon. Betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April? Dari termohon? KPU? Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya? Hah? Gimana ini KPU?" ucap Arief.

Tak hanya itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo yang bertindak sebagai Ketua Panel Satu persidangan perkara PPHU Pileg 2024 sempat menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin untuk meninggalkan sidang.

(Ant/Obi)-f

Sambungan hal 1

## Desa

Kemenkeu dengan APBN lewat Dana Desa dan juga khusus Di Yogyakarta memiliki Dana Keistimewaan yang bisa dipakai untuk pengembangan desa," tegasnya.

Untuk dana tambahan desa, alokasi penyeretaan mencapai Rp 2 triliun, dana itu dibagi ke desa yang memiliki kinerja bagus. Setiap desa akan mendapatkan dana tambahan sekitar Rp 150 juta.

Kepala Perbendaharaan Keuangan Di Yogyakarta Agung Yulianto mengatakan, dengan ditetapkan Desa Nglangeran sebagai Desa Keuangan pertama di Indonesia, merupakan kebanggaan tersendiri. "Namun yang menjadi konsen utama adalah alokasi APBN lewat alokasi dan skema apapun dan pembiayaannya, ini menunjukkan bahwa kita bisa memanfaatkan dana yang diberikan dengan baik

dan benar," ujarnya.

Menurutnya, ini sangat keren sekali. "Ini menunjukkan bahwa pembiayaan lewat skema apapun, menunjukkan Desa Keuangan ini bisa fokus memanfaatkan dana dari berbagai skema tadi untuk pemberdayaan daerah ini," tegasnya.

Bahkan Nglangeran bisa mengantisipasi kekurangan dan apa yang harus dikembangkan. "Kami siap mendampingi dan mensupport apa saja yang dibutuhkan," tegasnya.

Mengenai dana yang dialokasikan dari transfer ke daerah khususnya Desa Nglangeran, Agung mengatakan, ada Dana Desa setiap tahun yang dialokasikan penggunaannya untuk pembangunan desa, untuk operasional, BKT, termasuk kegiatan BUMDes. "Itu mestinya bukan mengandalkan itu, kalau sudah BUMDes,

biasa menggali sumber sumber pendapatan asli desa dan ini stimulus serta menjadi modal awal," ujarnya.

Menurutnya, begitu sudah bisa mengkretek pendapatan Dana Desa, itu merupakan potensi untuk pengembangan desa. Agung juga menyampaikan, peluang desa di Di Yogyakarta menjadi Desa Keuangan, menjadi trigger bagi desa-desa di sekitar Gunungkidul dan juga desa-desa wisata lainnya yang ada di DIY. "Ini akan membuat trigger bagi desa wisata di daerah lain, akan mulai bangkit satu persatu, dan juga harus membangun interkoneksi dengan desa lainnya. Kelebihannya apa? Dan harus berkolaborasi serta saling melengkapi. Kalau itu terjadi akan keren sekali, Gunungkidul dan daerah di sekitarnya akan tumbuh. Apalagi banyak destinasi wisata di daerah ini," tegasnya.

(Lmg)-f

Sambungan hal 1

## Pendidikan Politik

bangsa mengelola Pemilihan Umum yang baru saja usai dalam konteks pendidikan politik. Pendidikan pada wilayah ini sangat penting dan strategis bagi masa depan kita. Sayangnya, partai beserta pemimpinnya sering melupakan bahwa pemilu juga kegiatan maha penting bagi pendidikan politik dan demokrasi sebuah bangsa.

Lebih-lebih Pemilu 2024 melibatkan kaum muda sebagai penentu utamanya.

Pendidikan politik mengajarkan individu atau kelompok tentang sistem politik, teori, dan konsep, serta mengembangkan kesadaran tentang hak dan tanggung jawab warga, partisipasi politik, dan keterampilan berpikir kritis. Tujuannya memberikan pengetahuan dan alat yang diperlukan bagi masyarakat untuk memahami bagaimana sistem politik beroperasi dan dapat terlibat aktif dalam proses politik.

Pendidikan politik dapat dilakukan di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, perguruan tinggi, universitas, organisasi masyarakat, dan kelompok advokasi politik. Pendidikan ini memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran warga negara dalam memberikan kontribusi positif pada proses politik yang pada akhirnya akan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di era yang semakin terbuka serta semakin intensifnya masyarakat menggunakan media digital, pendidikan politik sejatinya berlang-

sung secara alami lewat berbagai berita, wacana, dan keputusan yang diambil para pemimpin/penguasa dan aktivis politik.

Lewat ucapan, tindakan, dan lobi-lobi politik yang mereka lakukan, masyarakat secara tidak langsung belajar dan memahami bagaimana politik dan demokrasi berkerja.

Pelajaran yang dipetik masyarakat sangat banyak serta tidak melulu terkait dengan bagaimana mekanisme atau prosedur keputusan politik diambil. Di sebalik berbagai prosedur formal tersebut, masyarakat belajar tentang nilai-nilai serta landasan etika dan moral yang terkait. Nilai etika dan moral politik ini malah lebih penting karena dapat menjadi dasar untuk menentukan kualitas hidup berdemokrasi.

Sayangnya, di tengah gegap gempita menjalani proses Pemilu, kita mendapati berbagai ajaran politik dan demokrasi yang amburadul. Para tokoh politik mengambil keputusan pencalonan presiden dan wakilnya hanya berlandaskan pertimbangan elektoral alias kemenangan. Langkah ini memberikan pelajaran yang buruk bagi masyarakat karena partai dan koalisinya sungguh hanya berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan sesaat. Partai tidak sungguh berpikir apakah calon yang diajukan sungguh memiliki kompetensi, pengalaman, serta kepantasan memimpin bangsa yang besar nan kompleks ini.

Pertimbangan semata elektoral ini juga ter-

jadi bagi jabatan politis lain seperti anggota DPR pada tingkat pusat, provinsi, serta daerah.

Selain itu, setiap saat masyarakat juga disuguih dengan tingkah-laku politik yang jauh dari nilai-nilai keutamaan. Para tokoh politik berdebat dan berwacana secara tidak rasional dan menggunakan retorika yang dangkal serta tidak mendidik kedewasaan masyarakat untuk bersikap dan bertindak rasional.

Keutamaan apa yang akan diajarkan kepada masyarakat kalau para politikus dengan mudah berpindah menjadi anggota partai lain demi mendapat posisi terhormat.

Demikian pula, partai dengan mudah berpindah dari satu koalisi ke koalisi lain dengan alasan yang dibuat-buat seolah demi kepentingan bangsa padahal demi kekuasaan semata.

Untunglah, di tengah karut-marut pendidikan politik semacam itu, para profesor berani keluar kampus menyuarakan pentingnya etika dan nilai-nilai dasar dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun hasilnya tidak serta merta mengubah keputusan politik, suara profesor yang berseru-seru di padang gelanggang politik nasional telah menjadi oase tersendiri. Kita tinggal menunggu bagaimana oase rasionalitas dan etika itu akhirnya akan menemukan relevansinya dalam 5 tahun mendatang.

(Penulis adalah dosen tetap Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)-d

Sambungan hal 1

## YIA SATU-SATUNYA BANDARA INTERNASIONAL DI DIY-JATENG

# Sultan Berharap Penerbangan Bisa Ditambah

**YOGYA (KR)** - Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No 31/2024, Yogyakarta International Airport (YIA) menjadi satu-satunya bandara yang berstatus internasional di wilayah DIY dan Jawa Tengah yang akan ke luar negeri harus melalui YIA.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap nantinya ada tambahan penerbangan dengan keputusan tersebut. Meski pihaknya masih akan melihat perkembangan lalu lintas penerbangan di YIA terlebih dahulu selama satu atau dua bulan ke depan, menyusul ditetapkannya YIA sebagai satu-satunya bandara internasional di Jateng dan DIY.

"Soal kajian terhadap penambahan penerbangan itu harus direncanakan matang. Meski begitu dimungkinkan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan ditetapkannya YIA sebagai

satu-satunya penerbangan internasional di DIY-Jateng. Karena mobilitas penduduk hanya lintas regional saja yaitu dari area Solo atau Semarang yang akan terbang ke luar negeri," kata Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (2/5).

Sultan mengatakan, seharusnya ada penambahan penerbangan dengan ditetapkannya YIA sebagai satu-satunya bandara internasional di DIY-Jateng. Dengan potensi lonjakan penumpang dari seputaran Jateng, maka harusnya bisa dimaksimalkan.

Pih Ketua Association of The Indonesian Tours & Travel Agencies (Asita) DIY Edwin Ismed Himna menyatakan, penetapan YIA sebagai satu-satunya bandara internasional di DIY-Jateng merupakan peluang emas yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Keputusan tersebut menjadi angin segar bagi industri pariwisata, dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan begitu, otomatis Yogya bisa menjadi pemimpin kedatangan wisatawan.

(Ria)-d

## Pendidikan Sudah

sederhana mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Pada awal perjalanan, semua orang menyadari, perubahan membutuhkan perjuangan. Wajar jika ada rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan.

Nadiem mengatakan, kini masyarakat mulai merasakan perubahan yang terjadi berkat gerakan Merdeka Belajar. Perubahan yang terjadi dalam ekosistem pendidikan dan kebudayaan berlangsung serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia muncul berangkat dari gerakan Merdeka

Belajar.

Mendikbudristek menyebut banyaknya cerita positif dari anak-anak Indonesia atas situasi pembelajaran di kelas. Tak hanya itu, guru kini berani mencoba berbagai hal baru, karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Para mahasiswa lebih siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Belum lagi, para seniman dan pelaku budaya yang makin semarak menggelgar karya-karya kreatif nan ekspresif.

(Ati)-f

Sambungan hal 1

## Tito:

Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun atau lebih dan sudah kawin. Kedua, bukan merupakan anggota TNI-Polri.

"Usia 17 tahun dihitung sampai hari H Pilkada Serentak 2024, 27 November 2024," terang Tito.

la juga mengingatkan, agar KPU melindungi keamanan data pemilih tersebut sebagaimana diatur

dalam UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 2022.

"Upaya yang sudah dilakukan Kemendagri di antaranya dengan berkoordinasi bersama Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dan KPU RI dalam proses teknis key ceremony dan enkripsi data DP4," ucapnya.

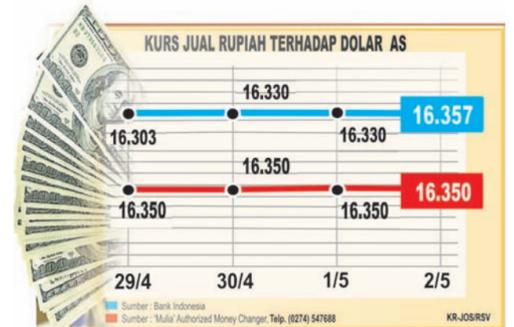
(Ant/Obi)-f

Sambungan hal 1

## Dari Sambungan hal 1

terdapat 540 kematian dan 76.132 kasus. la pun mengingatkan publik untuk melakukan langkah-langkah pencegahan demam berdarah dengue, seperti pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan mengubur (3M) tempat yang berisiko menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk. "Bila demam tiga hari tidak menurun juga, segera ke rumah sakit atau Puskesmas. Pastikan lingkungan sekitar kita bersih," tambahnya.

(Ant/San)-f



Prakiraan Cuaca						Jumat, 3 Mei 2024	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban	
Bantul					22-30	65-95	
Sleman					22-29	65-95	
Wates					22-29	65-95	
Wonosari					22-30	65-95	
Yogyakarta					22-30	65-95	

Sumber: Bank Indonesia  
Sumber: "Mali Authorized Money Changer, Telp. (0274) 547688  
KR-JOS/RSV  
Grafis: Arko

**Alfriandi Dwi Atmoko, SE, MSi, Ak, ACPA**  
Dosen Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta

HAI sobat pembaca Kedaulatan Rakyat yang inspiratif. Kali ini saya akan membahas mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan

# Sanksi Bagi Wajib Pajak Terlambat Laporan SPT Tahunan

(SPT) bagi Wajib Pajak (WP). Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan subjek pajak, bahkan ketika ia dilahirkan di dunia ini merupakan subjek pajak dan memiliki kewajiban perpajakan, eitsss tapi tenang, bayi yang dilahirkan tidak perlu melaporkan SPT kok. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang wajib dilaporkan oleh WP baik WP Orang Pribadi (OP) maupun WP Badan. WP adalah OP atau Badan yang terdaftar dengan ditandai adanya kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Namun pelaporan masing-masing WP berbeda. Untuk WP OP wajib melaporkan pada batas 31 Maret tahun

berikutnya dan untuk WP Badan adalah sampai 30 April tahun berikutnya. Misalnya jika Bu Budi merupakan WP OP maka Bu Budi wajib melaporkan SPT Tahunan tahun 2023 pada maksimal tanggal 31 Maret 2024, sedangkan jika Bu Budi memiliki perusahaan (CV misalnya) yang merupakan WP Badan maka pelaporan SPT Tahunan tahun 2023 maksimal adalah tanggal 30 April 2024.

Karena pelaporan SPT Tahunan sifatnya wajib maka apabila WP OP maupun WP Badan tidak melaporkan SPT Tahunannya maka ada denda yang harus ditanggung oleh WP tersebut bahkan sampai

pidana. Ada 4 kategori pelanggaran terhadap pelaporan SPT Tahunan yang dapat dikenakan sanksi. Yang pertama terlambat melaporkan SPT Tahunan, kedua pelaporan SPT Tahunan kurang lengkap atau tidak benar, ketiga tidak melaporkan SPT Tahunan dan keempat salah perhitungan pajak. Nah apa saja sanksi bagi WP yang melakukan pelanggaran tersebut?

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bagi WP yang terlambat atau tidak melaporkan SPT akan menerima denda dengan besaran tertentu, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UU KUP bagi

WP OP dendanya sebesar Rp 100.000 sedangkan untuk WP Badan sebesar Rp 1.000.000. Apabila WP terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar maka WP akan dikenai sanksi kenaikan pembayaran sebesar 200% dari nilai pajak yang terutang dan akan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Apabila terdapat kesalahan perhitungan pajak pada SPT Tahunan yang telah dilaporkan namun WP menyadari dan memperbaiki perhitungan atas kemauan sendiri dan apabila hasil perhitungan menyebabkan utang pajak semakin besar maka WP membayar denda berupa bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang

kurang dibayar. Namun apabila kesalahan tersebut diketahui pada saat pemeriksaan oleh petugas pajak, maka WP wajib membayar denda sebesar 150% atas jumlah pajak yang kurang bayar. Apabila status SPT Tahunan WP kurang bayar, namun WP terlambat melakukan pembayaran pajak, maka WP dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Sanksi terberat bagi WP adalah sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 39 UU KUP setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga



menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenai sanksi pidana. Paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun serta denda yang harus dibayarkan adalah paling sedikit dua kali lipat atas jumlah pajak terutang dan paling banyak empat kali lipat atas jumlah pajak terutang yang kurang dibayar. Nah bagi WP yang sudah terlambat melaporkan SPT dapat mengajukan perpanjangan waktu untuk pelaporannya, yang pasti harus sesuai dengan ketentuannya yaa..